ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - SUMBER DAYA PANAS BUMI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 90/PMK.02/2017 TANGGAL 5 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (919)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/ KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI / LISTRIK.

ABSTRAK : - bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan di bidang perusahaan panas bumi termasuk ketentuan mengenai penggantian bonus produksi, serta penyesuaian nomenklatur organisasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan ketentuan mengenai tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas hasil perusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi listrik yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209 / KMK.04 / 1998.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

KMK 766/KMK.04/1992 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 209/ KMK.04/1998;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai beberapa perubahan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/ KMK.04/1992, antara lain:

1. Perubahan dan perluasan definisi dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum
2. Menghapus ketentuan dalam Pasal 2 mengenai bonus produksi yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah diberikan penggantian dari setoran bagian Pemerintah.
3. Penambahan Pasal 3A yang mengatur mengenai batas waktu penyetoran bagian pemerintah ke dalam Rekening Panas Bumi.
4. Memperluas ketentuan Pasal 4 mengenai pembebasan bea masuk untuk kontraktor kontrak operasi bersama (*joint operation contract*) diberikan fasilitas sesuai kontrak operasi bersama.
5. Meniadakan batasan Pengembalian PPN dalam Pasal 5 yang sebelumnya diberikan untuk masing-masing kegiatan Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah menghasilkan, paling banyak sebesar penyetoran jumlah bagian Pemerintah yang telah dilaksanakan, dan sebelum PPN dikembalikan, pengusaha sumber daya panas bumi diwajibkan terlebih dahulu melunasi tunggakan-tunggakan pajak lainnya.
6. Menyesuaikan dan memperbaharui referensi Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan dan peraturan terkait dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10.
7. Penyempurnaan Pasal 11 mengenai penyebutan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan mengenai perangsang panasbumi (Geothermal Allowance) dan atau perangsang lainnya.
8. Perubahan ketentuan dalam Pasal 12 mengenai Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan.
9. Menghapus Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 16.
10. Penambahan Pasal 13A mengenai uji kepatuhan Pengusaha atas kewajiban pemenuhan penyetoran bagian Pemerintah yang dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pasal 13B mengenai keberatan oleh Pengusaha atas penetapan atau tagihan atas kekurangan setor bagian Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 209/KMK.04/1998

0 Peraturan Menteri ini mengubah 766/KMK.04/1992